

Laporan Hasil Penelitian Individu

Dr. H. M. Afif Anshori, M.g.

# **PEMETAAN RESOLUSI KONFLIK DI LAMPUNG**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2013

# **PEMETAAN RESOLUSI KONFLIK DI LAMPUNG**

## **(Sebuah Penelitian Awal)**

Oleh:

M. Afif Anshori

Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA IAIN Raden Intan  
Tahun Anggaran 2013



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2013

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

### Hak Cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

---

Judul Buku : Pemetaan Konflik di Lampung: Sebuah Penelitian Awal

---

Penulis : M. Afif Anshori

---

Cetakan Pertama : 2013

---

Desain Cover : Puji

---

Computer Setting, Lay out oleh : Puji

---

Dicetak Oleh : Percetakan Osa

---

Diterbitkan Oleh :

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

---

ISBN :

---



## **SAMBUTAN KETUA**

### **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

-----

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

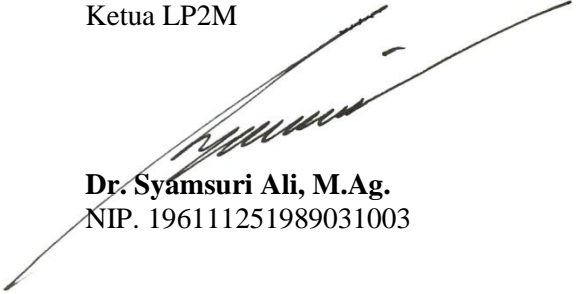
Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung tahun 2013 dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung tahun 2013.

Kami menyambut baik hasil penelitian individu kompetitif yang dilaksanakan oleh Saudara Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag. dengan judul "Pemetaan Resolusi Konflik di Provinsi Lampung (Sebuah Penelitian Awal) berdasarkan SK Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor: 69.a Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, November 2013  
Ketua LP2M



**Dr. Syamsuri Ali, M.Ag.**  
NIP. 196111251989031003



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis persembahkan kepada Allah S.w.t. yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan jasmani dan ruhani sehingga penelitian ini dapat dikerjakan dan diselesaikan. Selawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad S.a.w., keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya *hatta yaumal qiyamah*.

Penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selesaiannya penelitian ini adalah berkat bantuan dari teman-teman peneliti yang selalu memerikan suport, masukan dan motivasi konstruktif. Karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Semoga saja bantuan teman-teman semuanya menjadi amal baik mereka di sisi Allah, dan akan dibalas kelak di hari akhir dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan mungkin kesalahan di sana-sini terutama dalam penulisannya. Oleh karena itu, koreksi, masukan, dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pembaca sangat diharapkan dan diterima untuk kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,  
2013

Desember

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Metode Penelitian .....	21

BAB II MEMAHAMI DAN MENGANALISIS KONFLIK

A. Pengertian, Jenis dan Penyebab Konflik.....	25
B. Berbagai Pendekatan Pengelolaan Konflik.....	31
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Konflik .....	34
D. Analisis Konflik .....	36
E. Isu-Isu Konflik dan Akar Permasalahannya .....	41

BAB III LAMPUNG DALAM BERBAGAI ASPEK

A. Tinjauan Historis.....	51
B. Tinjauan Geografis dan Demografis .....	57
C. Masyarakat Lampung dalam Perspektif Sosiologis .	65
D. Berbagai Konflik Komunal dan Akar Masalahnya. .	81

BAB IV KONFLIK DI LAMPUNG DAN PEMETAANNYA

A. Konflik Mesuji dan Akar masalahnya .....	89
B. Konflik Tulangbawang .....	100
C. Konflik Lampung Utara.....	105
D. Konflik Lampung Tengah.....	107
E. Konflik Lampung Selatan .....	111
F. Analisis Konflik di Lampung.....	116

## BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan.....	. 123
B. Rekomendasi .....	. 123
C. Kata Penutup .....	. 125

DAFTAR PUSTAKA .....	. 127
----------------------	-------

## **BAB II**

### **MEMAHAMI DAN MENGANALISIS KONFLIK**

#### **F. Pengertian, Jenis dan Penyebab Konflik**

##### **4. Pengertian Konflik**

Istilah konflik sangat sering kita dengar, mulai dari level yang sangat sempit yaitu konflik keluarga sampai dengan level yang sangat luas seperti konflik antar negara atau konflik internasional. Kita dapat mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Konflik berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti pertentangan. Konflik memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi maupun manajemen. Para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- e. Konflik adalah pertentangan antara banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Karenanya konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan yang dapat bersifat positif atau bersifat negatif (Johnson dan Dunker (1993) dalam Mitchell et al, 2000);



- f. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001);
- g. Konflik adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan, tujuan yang bertentangan (Angel dan Korf, 2005);
- h. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai suatu obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010).

Menurut Hardjana (1994) konflik, perselisihan, percekcoan, pertentangan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar dan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat jika konflik itu diuraikan dan dilukiskan. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang/kelompok atau lebih, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau beberapa orang/kelompok tersebut saling terganggu.

Konflik merupakan hal yang dapat atau biasa terjadi dalam hidup. Secara teoritis konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial, tidak hanya disebabkan karena adanya perjuangan untuk bertahan hidup dengan keterbatasan ruang/sumber daya

(struggle for limited space/resources), tetapi dikarenakan adanya insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia (innate instinct).

## **5. Jenis Konflik**

Ada beragam konflik, tergantung dari sudut pandang, sehingga jika dipandang dari aspek perilaku terhadap sasaran, maka konflik ada 4 kategori yaitu :

- e. Pra Konflik, yaitu ada perbedaan tetapi belum menjadi sumber konflik;
- f. Konflik tertutup (latent), yaitu konflik tersembunyi atau tidak muncul dipermukaan tetapi terus berlangsung;
- g. Konflik permukaan (emerging) yaitu konflik yang nampak/muncul hanya karena kesalahpahaman atas sasaran yang ingin dicapai;
- h. Konflik terbuka (manifest) yaitu konflik atau pertentangan yang sangat nyata dan berakar sangat mendalam.

Wirawan (2010) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek:

### **1. Aspek subyek yang terlibat dalam konflik**

- d. Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan;

- e. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan;
- f. Conflict of interest berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki interest yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi.

## 2. Aspek substansi konflik

- c. Konflik realistis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/ pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi ataupun voting;
- d. Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungan dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.

## 3. Aspek keluaran

- c. Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi;
- d. Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.

## 4. Aspek bidang kehidupan

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDH merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.

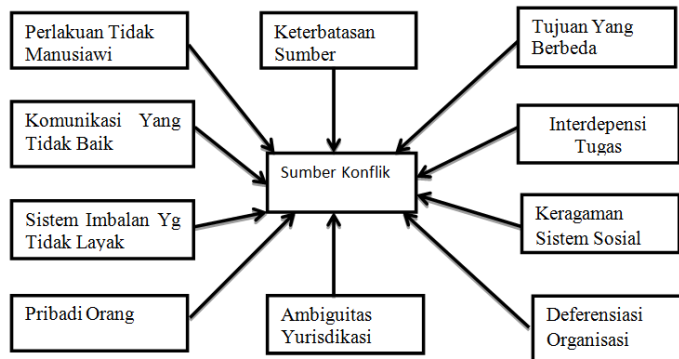
Suporahardjo (2000) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal.

## **6. Penyebab Konflik**

Sumber konflik menurut Suporahardjo (2000) adalah adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim). Fisher et. al. (2001) menyebutkan penyebab konflik adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini

muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam.

Menurut Wirawan (2010) konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana nampak pada diagram berikut ini.



(Sumber : Fisher et.al (2001))

Engel dan Korf (2005) menyebutkan ada 4 penyebab konflik Sumber Daya Alam (SDA) yaitu: (1) persaingan yang ketat akan pemanfaatan SDA; (2) pertentangan antara hukum adat dan hukum positif; (3) perubahan terkait dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan penggunaan SDA, (4) kebijakan,

program, kegiatan pengelolaan SDA sering menjadi sumber konflik, karena kebijakan sering ditentukan tanpa partisipasi, identifikasi dan konsultasi pemangku-kepentingan yang sering tidak tepat, penyampaian informasi yang tidak tepat, kapasitas kelembagaan yang tidak memadai, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan tidak memadai sehingga mempersulit identifikasi dan penyelesaian masalah.

Secara umum persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat desa hutan ; pertama : kepastian hak penguasaan SDH (*forests tenur security*), kedua Menurut Hardjana (1994) secara garis besar, penyebab atau inti konflik itu dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: (1) Masalah struktural; (2) Masalah kepentingan; (3) Masalah perbedaan nilai; (4) Masalah perbedaan data; dan (5) Masalah hubungan antar manusia. Konflik dapat berintikan salah satu atau gabungan dua atau lebih diantara inti konflik yang telah disebutkan di atas.

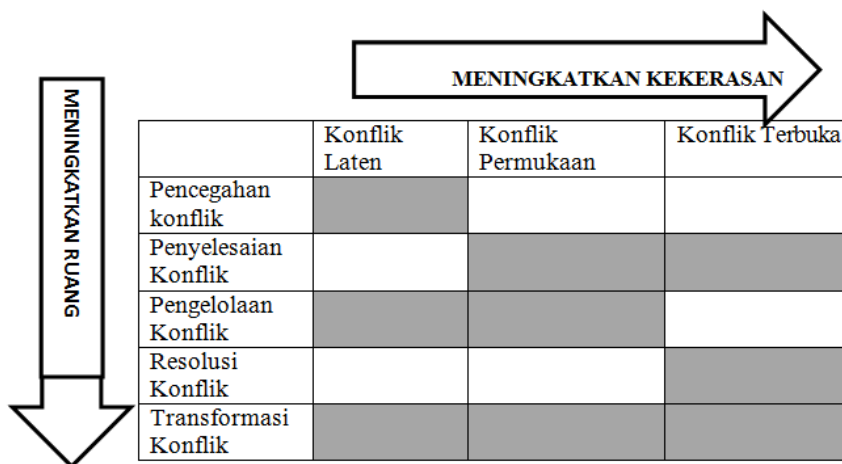
### **G. Berbagai Pendekatan Pengelolaan Konflik**

Seiring dengan perkembangan ilmu, muncul berbagai teori tentang konflik, mulai dari ilmu yang sangat teoritis, sampai dengan yang lebih bersifat aplikatif yaitu ilmu mengelola konflik (*conflict management*). Konflik terus dipelajari karena konflik sendiri bermanfaat dan merupakan bagian dari kehidupan kita.

Untuk dapat lebih memahami (pengelolaan) konflik, banyak istilah berkaitan konflik yang perlu dipahami bersama. Fisher (2001) menjelaskan perbedaan istilah-istilah sebagai berikut:

6. Pencegahan Konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras;
7. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian;
8. Pengelolaan Konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
9. Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan;
10. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.





(Sumber: Fisher, 2001 hal.7 gbr 1.2)

Wirawan (2010) menjelaskan resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan metoda resolusi konflik, sedangkan metoda resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik yang mencakup metoda pengaturan sendiri (self regulation) maupun metoda intervensi pihak ketiga.

Manajemen konflik yaitu praktek mengidentifikasi konflik, menangani konflik secara bijaksana, adil, efisien dan mencegah konflik agar tidak lepas kendali. Metoda pengaturan sendiri yaitu : win-win solution (kolaborasi-kompromi), win and loses solution (memperkecil posisi lawan), ataupun metoda menghindar,

sedangkan metoda intervensi pihak ketiga yaitu melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif yaitu terdiri dari mediasi, arbitrase dan ombudsmen.

Ada tiga komponen utama dalam konflik, yaitu: (1) kepentingan (interests), baik yang bersifat subyektif ataupun obyektif; (2) emosi (emotional), yaitu perasaan seperti kemarahan, ketakutan dan lain-lain; (3) nilai (values), yang seringkali sulit terukur dan tertanam pada ide dan perasaan mengenai benar dan salah dalam mengatur perilaku kita (Soekanto, 1990 dalam Sardjono, 2004).

## **H. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Konflik**

7. Sebuah analisis konflik harus berdasarkan pada sejumlah besar pandangan mengenai sumber konflik. Konflik adalah mengenai persepsi dan pengertian orang-orang mengenai kejadian, kebijakan dan institusi-institusi.
8. Analisis konflik membantu para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kembali perspektif mereka yang lebih sering dipengaruhi oleh emosi, salah pengertian, asumsi, ecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi konflik emosi dapat dengan mudah mengalahkan logika dan kenyataan. Karena itu penting untuk membedakan opini dan fakta.

9. Analisis konflik harus menguji konteks pengembangan yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik) dan tidak hanya mempertimbangkan kekuatiran mengenai pengelolaan sumber daya alam.
10. Setiap analisis konflik hanya merupakan permulaan dan harus diolah dan dipelajari secara hati-hati seiring dengan proses yang berjalan.
11. Analisis konflik bukan merupakan suatu akhir. Ini merupakan bagian dari proses mewujudkan proses pembelajaran mengenai isu-isu (membangun kapasitas). Untuk mewujudkan proses pembelajaran, analisis konflik harus dijalankan secara partisipatif. Melalui pertukaran informasi, orang kemungkinan besar menjadi fokus pada masalah-masalahnya dalam proses negosiasi.
12. Penting untuk tahu apa yang perlu diketahui. Jenis dan jumlah informasi yang dibutuhkan dari analisis konflik berbeda dari kasus ke kasus. Walaupun sering diasumsikan bahwa informasi yang lebih banyak lebih baik dari pada informasi yang lebih sedikit, namun mungkin tidak semua informasi relevan dapat dipercaya atau berguna. Disamping itu, kebutuhan informasi yang dianggap perlu sering kali dibatasi oleh waktu, sumber daya atau keahlian. Dalam hal ini, penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan informasi

yang detail, tepat dan handal “secukupnya”. Pengumpulan data atau analisis yang lebih dari pada itu tidak perlu.

## **I. Analisis Konflik**

Langkah awal dalam pengelolaan konflik adalah analisis konflik. Analisis konflik penting untuk mengetahui dan mengerti mengenai keadaan dimana mereka bekerja agar semakin sedikit mereka melakukan kesalahan dan semakin besar kemungkinan mereka bisa mendampingi para pemangku kepentingan secara efektif.

Analisis konflik membantu untuk :

- k. Membuat kejelasan dan membuat prioritas banyaknya isu yang perlu ditangani;
- l. Melakukan identifikasi dampak-dampak konflik;
- m. Melakukan identifikasi akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik untuk menentukan tanggapan yang sesuai;
- n. Menentukan motivasi dan insentif para pemangku kepentingan melalui pemahaman mengenai kepentingan, kebutuhan dan pandangan merekaterhadap konflik;
- o. Menilai sifat dan bentuk hubungan antara para pemangku kepentingan, termasuk keinginan dan kemampuan mereka untuk berunding satu dengan lainnya;

- p. Melakukan identifikasi informasi yang tersedia mengenai konflik dan informasi lainnya yang dibutuhkan;
- q. Mengevaluasi kapasitas dari institusi atau praktek pengelolaan konflik untuk menangani konflik yang ada;
- r. Membangun hubungan baik dan pengertian diantara para pemangku kepentingan;
- s. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan analisis dari para pemangku kepentingan lokal untuk menangani konflik saat ini dan dimasa mendatang;
- t. Meningkatkan pengertian mengenai hubungan antara konteks sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas dengan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya.

### **Pertanyaan-pertanyaan Kunci untuk Membantu Menganalisis Konflik**

#### **1. Tentang apa konflik tersebut**

Sebuah konflik sering lebih kompleks dari pada kelihatannya. Apa jenis konfliknya, sejauh mana pandangan mereka yang berkonflik berbeda? Apa yang kelihatannya menjadi faktor langsung atau tidak langsung dibalik konflik? Apakah ada faktor-faktor penghidupan, institusional, politik atau struktural yang lebih dalam dibalik konflik?

#### **2. Siapa yang terlibat dalam konflik?**

Membangun konsensus yang efektif tergantung pada keterlibatan semua grup pemangku kepentingan yang berhubungan dengan konflik. Oleh karena itu penting untuk melakukan identifikasi para pemangku kepentingan secara akurat. Apakah ada grup yang tidak hadir tetapi mempunyai peran langsung atau tidak langsung dalam konflik, seperti para administrator, pengguna sumber daya dari komunitas-komunitas terdekat atau penduduk yang berpindah/imigran, penggembala, petani, atau pekerja kasar.

3. Apa motivasi atau imbalan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan konflik mereka?

Mengajak orang-orang untuk menyelesaikan konflik melalui manajemen kolaborasi atau cara-cara lainnya mungkin akan sulit jika pihak-pihak yang terlibat tidak merasa atau menganggapnya perlu untuk mengelola atau menyelesaikannya. Selain itu, mungkin ada insentif-insentif ekonomi, politik. Budaya atau lainnya yang mempengaruhi keinginan para pihak untuk ikut serta dalam pengelolaan konflik. Hal yang sama pentingnya adalah untuk menemukan jika ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari kelanjutan konflik, atau siapa yang akan menentang keinginan untuk menghentikan konflik (apakah beberapa orang mempunyai kepentingan untuk mengulangi konflik?).

4. Strategi-strategi pengelolaan konflik apa yang sudah dicoba pada masa lalu?

Merupakan hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan strategi-strategi apa yang pernah dicoba untuk menyelesaikan konflik. Apa hasil yang pernah diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Apa keuntungan atau kerugian menggunakan suatu strategi atau jika menggunakan strategi-strategi yang sama untuk konflik saat ini?

Konflik dapat dianalisa dengan bantuan sejumlah alat/instrumen yang sederhana, praktis, dan dapat diadaptasikan. Tabel 1 menjelaskan mengenai alat/instrumen tersebut dan bagaimana menggunakannya di lapangan. Penerapan instrumen tersebut bukan merupakan hal yang kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi yang spesifik dan kebutuhan para mediator.

Tabel 1 : Berbagai Alat/Instrumen Dalam Analisis Konflik

No	Instrumen	Tujuan
1.	Analisis akar permasalahan	Untuk membantu para pemangku kepentingan menguji asal usul dan sebab-sebab dasar dari konflik.
2.	Analisis isu	Untuk menguji isu-isu yang berkontribusi terhadap konflik dan isu-isu spesifik yang meningkat menjadi konflik yang spesifik, yang secara lebih detail difokuskan pada 5 kategori, yaitu:



		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masalah yang berhubungan dengan informasi</li> <li>✓ Konflik kepentingan</li> <li>✓ Hubungan yang sulit</li> <li>✓ Ketidaksamaan struktural</li> <li>✓ Nilai-nilai yang bertentangan</li> </ul>
3	Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	Untuk melakukan identifikasi dan menilai ketergantungan dan kekuasaan dari para pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam suatu konflik.
4	Analisis 4 R (right, responsibilities, returns, relationships-hak, tanggung jawab, hasil, hubungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk menguji hak, tanggung jawab dan keuntungan para pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungannya dengan sumber daya alam, sebagai bagian dari usaha memperbaiki pemahaman akan suatu konflik.</li> <li>➤ Untuk menguji hubungan antar atau dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda.</li> </ul>
5.	Konflik waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menguji sejarah sebuah konflik</li> <li>➤ Untuk meningkatkan pemahaman terhadap urutan kejadian yang menghasilkan konflik tersebut</li> </ul>

6.	Pemetaan konflik penggunaan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk menunjukkan secara geografis dimana konflik-konflik lahan atau sumber daya terjadi atau mungkin terjadi dimasa mendatang</li> <li>➤ Untuk menentukan isu-isu primer konflik</li> </ul>
----	---	---

(Sumber: Engel dan Korf (2005))

## **J. Isu-Isu Konflik dan Akar Permasalahannya**

Analisis akar permasalahan konflik dimulai dengan melakukan identifikasi dan menjelaskan konflik, batas-batasnya, dan saling keterkaitannya.

### **1. Menggali Asal-Usul Konflik**

Menggali asal usul konflik bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana interpretasi orang-orang terhadap sejarah sebuah konflik.
- b. Menganalisa masalah yang besar dan kompleks sehubungan dengan penyebab konflik yang lebih kecil.

Asal-usul konflik dapat mencakup sejumlah kejadian, masalah dengan hubungan, dukungan kebijakan yang lemah, hak guna dan kepemilikan, proses pengelolaan yang tidak jelas, pertentangan nilai-nilai dan lain-lain.

Isu utama bagi para mediator adalah hubungan mereka dengan proses-proses pengelolaan konflik lokal yang ada. Apakah seorang

mediator harus bekerjasama dengan petugas administratif dan yudisial yang formal atau informal, atau bekerja secara independen?

Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi dimana seorang mediator diminta untuk bekerja. Mediator harus memiliki pemahaman atas proses-proses pengelolaan konflik lokal serta sejarah mengenai usaha-usaha pengelolaan konflik sebelumnya melalui penilaian/analisis awal.

#### Instrumen Inti 1 : Analisis akar permasalahan

Analisis permasalahan membantu memperjelas keterkaitan antara berbagai faktor yang berbeda dan penyebab-penyebab yang memicu konflik. Hal ini membantu dalam membentuk rantai sebab akibat yang sederhana, yang menunjukkan dinamika-dinamika mendasar dari konflik tersebut.

#### Instrumen Inti 2 : Analisis Isu

Analisis isu yaitu melakukan identifikasi dan menspesifikasi isu-isu inti yang berkontribusi terhadap suatu konflik dan memberikan sebuah checklist kepada para mediator untuk menentukan 5 kategori yang berbeda dari isu tersebut.

#### Instrumen pelengkap : Pemetaan

Mengembangkan suatu time line (waktu) dari konflik dapat membantu untuk mengklarifikasi urutan kejadian dan membantu tahapan berbeda dalam sejarah konflik. Pemetaan selalu berguna

untuk pemahaman yang lebih baik terhadap dimensi spasial dan batas-batas dari sebuah konflik.

## 2. Memverifikasi Persepsi, Fakta dan Informasi yang Dibutuhkan

Fasilitasi efektif memungkinkan orang-orang untuk mengutarakan pengetahuan mereka tentang berbagai kejadian, asumsi-asumsi dan kecurigaan-kecurigaan mereka terhadap suatu konflik. Para pemangku kepentingan biasanya cenderung memiliki beragam interpretasi tentang sebab-sebab awal konflik dan faktor-faktor berkontribusi terhadap suatu konflik. Hal ini mendorong kebutuhan untuk memperoleh dan memahami sudut pandang lokal mengenai sebuah konflik melalui berbagai sudut pandang yang berbeda dari para pemangku kepentingan, guna mengidentifikasi :

- ☐ Fakta mana yang disetujui/disepakati;
- ☐ Fakta mana yang harus diselidiki lebih lanjut;
- ☐ Dimana informasi yang lebih banyak dibutuhkan sebelum membuat keputusan tindakan.

## 3. Melakukan identifikasi hubungan keterkaitan

Pemetaan penyebab-penyebab konflik dan urutannya dapat memperbaiki pemahaman mengenai hubungan-hubungan kunci antara apa yang mungkin terlihat sebagai kejadian-kejadian yang terisolasi (terpisah). Apa yang terlihat sebagai perselisihan lokal mungkin diperburuk oleh ketidaksamaan mendasar atau keputusan yang dibuat dari jauh, tanpa pengetahuan dari masyarakat-

masyarakat terpencil. Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat asli, ketegangan-ketegangan yang sudah berlangsung sejak lama antara sistem-sistem pemanfaatan lahan adat dan pemerintah, tujuan-tujuan pembangunan nasional dan globalisasi mungkin terlihat tidak ada kaitannya dengan pengelolaan sehari-hari di area-area terpencil, namun faktor-faktor ini sering kali mempunyai pengaruh signifikan terhadap perselisihan-perselisihan lokal.

Instrumen pelengkap: Rentang waktu (time line) konflik

Rentang waktu konflik memungkinkan untuk mempelajari tahapan konflik, bagaimana kejadian spesifik terjadi dan tindakan apa dan oleh pemangku kepentingan yang mana yang menjadi penyebab kejadian tersebut.

Ketika konflik semakin jelas didefinisikan, jumlah pemangku kepentingan dalam konflik juga semakin jelas. Juga hubungan antara pemangku kepentingan dan antara pemangku kepentingan dengan isu-isu. Dalam sebuah proses pengelolaan sumber daya alam kolaboratif analisis pemangku kepentingan akan menentukan siapa yang sebaiknya terlibat dalam pengelolaan konflik.

Hal-hal yang perlu diidentifikasi :

- Siapa para pemangku kepentingan;

- Seberapa besar setiap kelompok pemangku kepentingan dipengaruhi oleh konflik;
- Siapa yang paling dipengaruhi dan seharusnya terlibat langsung dalam mengelola konflik;
- Kekuasaan dan pengaruh relatif dan kelompok-kelompok yang berbeda sehubungan dengan isu-isu, termasuk setiap halangan terhadap partisipasi kelompok tertentu dalam proses pengelolaan konflik;
- Kepentingan dan ekspektasi para pemangku kepentingan;
- Kemungkinan tanggapan yang berbeda dari para pemangku kepentingan dalam konflik;
- Hubungan antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan;
- Kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam bekerja sama;
- Kemungkinan kontribusi dari setiap kelompok untuk mengelola konflik;
- Besaran/luasan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok saling tumpang tindih.

#### 1. Siapa Pemangku Kepentingan?

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi (terkena dampak) hasil dari suatu konflik, serta mereka yang mempengaruhi hasil tersebut. Para pemangku kepentingan

mungkin memiliki identitas kolektif (seperti ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan atau keanggotaan kelompok pengguna sumber daya) atau memiliki karakteristik yang sama (seperti penggunaan sumber daya yang sama atau tinggal di daerah yang sama).

## 2. Para Pemangku Kepentingan dan Kekuasaan

Masing-masing kelompok pemangku kepentingan mempunyai kekuasaan relatif untuk mempengaruhi arah atau resolusi sebuah konflik. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai “kapasitas untuk mencapai hasil” (Ramirez, 1999). Termasuk di dalamnya kemampuan untuk membuat atau mencegah perubahan.

Kekuasaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti :

- Kekuatan fisik, daya tahan, kapasitas untuk kekerasan;
- Pesona pribadi, karisma;
- Kekuatan emosional, keberanian, kepemimpinan, komitmen, integritas;
- Kekuatan sosial-ekonomi, politik : kontrol atas akses sumber daya, kepemilikan lahan, hak-hak, uang, barang-barang, status sosial ekonomi, institusi-institusi politik, SDM;
- Kekuatan budaya : norma-norma dan nilai-nilai yang mapan, pembenaran dan penguatan peran yang berbeda, hak dan kewajiban dalam masyarakat;
- Kontrol terhadap informasi : teknis, perencanaan, ekonomi, politik;



- Kemampuan : kapasitas atau keahlian;
- Kemampuan untuk memaksa : ancaman, akses kepada dan penggunaan media, ikatan kekeluargaan atau politik, mobilisasi tindakan langsung.

*Kolaborasi berjalan dalam sebuah model pembagian kekuasaan.*

Para pemangku kepentingan saling memberikan otoritas satu sama lain untuk menghasilkan sebuah keputusan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak berarti bahwa pihak yang lebih kuat harus menyerahkan kekuasaan, atau semua sumber daya didistribusikan secara merata. Kolaborasi yang mendasar terjadi ketika para pemangku kepentingan telah saling menyetujui legitimasi dan kekuasaan mereka untuk mendefinisikan masalah dan mengusulkan pemecahan (Gray, 1989).

Ketidaksetaraan yang besar merupakan sebuah halangan bagi kolaborasi. Kelompok-kelompok yang kuat sering bertindak secara sepihak dan menolak untuk berunding atau berkolaborasi. Mereka juga mungkin memaksa pihak yang lemah untuk “menyetujui” sebuah keputusan. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui seberapa banyak kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan, jenis kekuasaan apa dan dari mana.

Instrumen Inti 3 : Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan

Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan membantu melakukan identifikasi dan menilai kekuasaan dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berbeda dalam sebuah konflik.

### 3. Hubungan Antara para Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan mempunyai sejumlah bentuk hubungan yang berbeda yang perlu diperhatikan dalam memahami konflik-konflik sumber daya alam, yaitu :

- Hubungan dengan sumber daya : hak, tanggung jawab dan manfaat/hasil yang diperoleh dari sumber daya.
- Hubungan satu dengan lainnya : secara individu, dalam kemitraan atau sebagai bagian dari aliansi yang lebih besar.

Kekuasaan dan kapasitas pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh kedua jenis hubungan tersebut. Hak akses dan kontrol, serta manfaat yang diperoleh dari sumber daya sering mendefinisikan peran dan kekuasaan para pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pengelolaan. Demikian pula aliansi dengan kelompok-kelompok, jaringan-jaringan dan tindakan-tindakan kolektif yang lain dapat menjadi alat dan cara tawar-menawar yang penting untuk mencapai pengaturan institusional yang baru dan diperlukan (Ramirez, 1999).

*Instrumen Inti 4 : Analisis 4 R (rights, responsibilities, returns and relationships : hak, tanggungjawab, hasil dan hubungan).* Analisis 4 R menggambarkan hak, tanggung jawab dan hasil untuk semua

pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungannya dengan penggunaan sumber daya. Hubungan-hubungan antara para pemangku kepentingan juga dapat dipetakan untuk menilai tingkatan dimana mereka positif atau bermasalah. Interaksi-interaksi positif dapat mengidentifikasikan kesempatan-kesempatan untuk membangun dukungan dan aliansi-aliansi yang berguna dalam pengelolaan konflik.

#### 4. Mempertimbangkan Jender

Pengelolaan sumber daya alam partisipatif yang efektif membutuhkan kolaborasi yang setara antara pria dan wanita. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan jenis kelamin dan isu-isu yang timbul dari peran yang berbeda, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Peran jender dalam sebuah masyarakat mempengaruhi kesetaraan, kesejahteraan, kekuasaan dan kesehatan.

Peran yang berbeda antara pria dan wanita mempengaruhi :

- ❖ Siapa yang mempunyai akses ke sumber daya yang spesifik dan penggunaannya;
- ❖ Siapa yang mempunyai dan mengontrol pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal lainnya;
- ❖ Siapa yang menerima manfaat/keuntungan dari sumber daya alam, keputusan pengelolaan, proyek yang bisa menghasilkan pendapatan dan program pelatihan;

- ❖ Siapa yang mempunyai otoritas dan partisipasi dalam pembuatan keputusan;
- ❖ Siapa yang perlu didukung sehingga sumber penghidupan yang berkesinambungan dapat ditingkatkan untuk seluruh masyarakat.

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat sering timbul dari ketidakseimbangan dalam peran, hubungan atau proses terkait dengan jenis kelamin. Wanita pedesaan biasanya mempunyai kerugian yang lebih besar dibanding pria karena pada umumnya mereka mempunyai :

- ❖ Status sosial, ekonomi dan hukum yang lebih rendah;
- ❖ Akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan teknis dan pelatihan, kredit, pasar dan pendanaan;
- ❖ Masukan yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali dalam perencanaan dan pembuatan keputusan.
- ❖ Hak pakai yang terbatas atau tidak ada sama sekali atas tanah, pohon, air serta produk-produk hutan yang lain.
- ❖ Secara proporsional hasil yang diperoleh dari sumber daya alam sangat sedikit.

## **BAB IV**

### **KONFLIK DI LAMPUNG DAN PEMETAANNYA**

#### **G. Konflik Mesuji dan Akar masalah.**

Konflik Mesuji yang telah berlangsung lama, berakar pada perebutan lahan. Semula, lahan yang yang diperebutkan merupakan kawasan tanah adat Megou Pak Tulangbawang. Menurut H As Sya'ib Akib, Kepala Marga Tegamo'an, Megou Pak Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, bahwa sejarah Megou Pak Tulang Bawang dan batasan wilayahnya meliputi Lampung Utara sampai Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Dulu, zaman pendudukan Belanda, seluas 33.500 hektar di Register 45 itu merupakan hutan larangan. Belanda tanda tangan lewat prosedur adat pada 12 April 1940. Ada pertemuan-pertemuan dan dari 33.500 hektar, sekitar 900 hektar dikeluarkan dari hutan larangan. Hutan larangan (hutan lindung) tersisa 32.600 hektar. "Ada berita acara. Ini yang kami maksud. Di sana juga tercantum Register 45 seluas 33.500 hektar," kata H. Asy Syaib.

Pada 7 Oktober 1991, terbit SK Menteri Kehutanan (Menhut) yang memberikan izin hutan tanaman industri (HTI) kepada PT Silva Inhutani Lampung Abadi seluas 32.600 hektar, di Register 45 Sungai Buaya, Tulang Bawang. Lalu, pada 22 November 1993, Kementerian Kehutanan, lewat SK Menhut no

785, memperluas register 45 hingga 43.100 hektar. Lahan Megou Pak Tulang Bawang dari Marga Suay Ompu pun terampas. Inilah yang menjadi cikal balak konflik hingga kini.

Pada 17 Februari 1997, lahan seluas 43.100 hektar itupun menjadi ‘milik’ PT Silva Inhutani setelah mendapat izin Kemenhut. “Kami sedih mengapa pemerintah Belanda ada aturan, malah pemerintah Republik Indonesia rampas saja tanpa bicara, tidak omong, tidak runding, keluar SK. Padahal katanya pemerintah RI dari rakyat dan untuk rakyat,” ucap As Sya’ib. Untuk itu, dia kembali menekankan, mereka datang meminta kelebihan lahan Register 45 yang telah dicaplok perusahaan. “Yang kami masalahkan lagi kelebihan itu, balikkan lagi ke masyarakat adat. Ini kami tuntutan. Register 45 sudah kami berikan. Yang kami tuntutan kelebihan. Bukan kawasan 33 ribu hektar. Kawasan yang selebihnya itu kami mau digusur. Kami minta tolong. Kami tak punya kekuatan. Tolong kami.” Mereka khawatir penggusuran berlanjut. Terlebih mereka mendengar Pemerintah Mesuji mengalokasikan dana sekitar Rp7 miliar, untuk menggusur warga. Mereka khawatir konflik berdarah kembali pecah, yang menyebabkan korban jiwa. “Pada November 2011 ribuan orang digusur, mereka ditampung di balai adat. Pada 2 Januari 2012 mereka ke Jakarta, lapor Ke komnas HAM, DPR. Namun, sudah setahun lebih tak ada upaya penyelesaian konflik.”

Malah, di Lampung, muncul Megou Pak ‘baru’ pada 5 Februari 2012 yang digagas Pemerintah Lampung. Kriminalisasi figur-figur di lembaga adat lama pun terjadi, seperti Wanmauli Sanggem, Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang, ditahan lima bulan dengan dakwaan kasus penipuan. “Tapi saya tak masalah. Ini upaya-upaya melemahkan perjuangan. Saya dipenjara dituduh menipu tanpa bukti jelas,” kata Wanmauli. “Bupati *abis* jabatannya, membentuk Megou Pak lagi. Megou Pak yang mana ini? *Kok* banyak amat. Megou Pak kami ini perpanjangan tangan seabad lalu, dengan data dan bukti. Kami ada,” ucap As Sya’ib.

As Sya’ib takut jika lembaga-lembaga adat Megou Pak ‘baru’ bermunculan terus, terjadi perang lagi. “Jangan sampai perang saudara.” Dia juga meminta kasus Mesuji di Register 45, jangan dipolitisir. “Jangan dijadikan arena politik untuk kepentingan sesaat. *Kalo* akan dijadikan demikian tak akan selesai-selesai (konflik ini).” Untuk itu, dia mengharapkan penuh dan sungguh, komisi-komisi di DPR terkait tanah dan kehutanan bisa menuntaskan kasus ini. “Kami minta kelebihan 10 ribuan itu kembalikan kepada kami, dan duduk bersama, siapa yang berhak dan tidak. Jika tak ada hak.”

Wanmauli juga mengungkapkan hal senada. Mereka sudah tidak mempermasalahkan lahan adat yang sudah diserahkan ke pemerintah Belanda, lalu Indonesia, seluas 33.500 hektar. “Yang

kami masalahkan itu kelebihan. Yang awal (konsesi perusahaan) 33 ribu hektar menjadi 43.100 hektar. Lahan 10 ribuan ini cikal bakal konflik di Mesuji.” Menurut dia, konflik makin panas karena ada oknum, mafia dan bermacam-macam kepentingan di sekitar itu. Kabar pemerintah Mesuji mengalokasikan dana untuk menggusur warga sekitar Rp7 miliar, membuat dia makin bertanya-tanya dan heran. Padahal, dari investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ditemukan pelanggaran oleh PT Silva. Temuan TGPF belum ditindaklanjuti, tetapi niat penggusuran terus berlanjut. Pemerintah seakan menjadi perpanjangan tangan perusahaan.

“Kami bertanya, kemaren ada TPGF, *kok* malah justru ada penggusuran. Kami tak *ngerti*. Kami *enggak* pernah dipanggil, *enggak* pernah diajak bicara. Tiba-tiba ada statemen pemda untuk gusur. Ini kedatangan kami. Kami orang sakit cari dokter, bagaimana obati ini,” ucap Wanmauli.

Adapun kesimpulan TGPF antara lain, ada pelanggaran-pelanggaran oleh PT SIL selaku pemegang izin HPHTI di kawasan hutan produksi Register 45, ditemukan dokumen yang menyebutkan pembiayaan Tim Terpadu Perlindungan Hutan khusus di Register 45 selama ini didanai oleh PT SIL. Lalu, temuan indikasi keterlibatan Pamswakarsa yang dibiayai PT SIL dalam penanganan konflik di Register 45, akibat pemukiman masyarakat pada kawasan hutan, terjadi pengabaian hak-hak dasar masyarakat



oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini hak-hak konstitusional warga negara selama belasan tahun. Kesimpulan lain dari TGPF, konflik agraria muncul diawali ada perluasan areal produksi PT SIL dari 33.500 hektar menjadi 43.100/42.762 hektar di era Orde Baru. Atas kebijakan perluasan lahan inilah masyarakat mengklaim, pemerintah mengambil tanah adat, tanpa memahami persis sejarah kawasan hutan. TGPF menemukan, ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus kematian Made Aste, yang perlu pendalaman oleh institusi yang berwenang (Komnas HAM). Juga ditemukan praktik jual beli lahan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak dan memperkeruh konflik di wilayah Register 45, ada aktor-aktor konflik dari luar Register 45 yang memiliki motivasi memperkeruh konflik dan mendapatkan keuntungan atas konflik.

Sudin, anggota Komisi IV dari Lampung, miris dengan kasus Mesuji ini. Dia kerap protes kepada Kemenhut, tapi tak digubris. Menurut Sudin, 1993, Kemenhut melepas ‘hutan larangan’ untuk hutan produksi kepada PT Inhutani. “PT Inhutani kerja sama sama PT Silva. Sekarang saham PT Inhutani malah hilang.” “Ini sudah saya tanyakan ke Kemenhut, saham milik BUMN *kok* malah hilang? Kok sekarang malah PT Silva?” Bukan itu saja, izin yang keluar untuk HTI, di lapangan malah menjadi kebun, sebagian lahan ditanam singkong, nanas. Saat ada

pertemuan dengan perusahaan di Pemda Lampung, Sudin mengungkapkan masalah ini. “Mereka (perusahaan) membantah, tapi saya sudah lihat langsung lewat helikopter.”

Siswono menyesalkan konflik ini berlarut. Namun dia yakin ada jalan keluar. Dia yang mengaku sudah bertemu dengan ‘pihak’ yang bersengketa, menawarkan kepada perwakilan lembaga adat untuk membicarakan alternatif selain tuntutan 10 ribuan hektar lahan itu. “*Kalo* ada peluang, akan bicarakan dengan pemerintah daerah. Misal, bisa, tapi tidak 10 ribuan. Jadi kebahagiaan semua pihak, masyarakat adat dapat lahan, pemerintah tidak tercoreng.” Firman Subagyo, Wakil Ketua Komisi IV mengatakan, dalam UU 41 tentang Kehutanan, masyarakat hukum adat masih dilindungi. “Selama masyarakat hukum adat ada, itu masih dilindungi.”

Sumber Tempo, Jum'at, 16 Desember 2011 menyebutkan, pada akhir 2011 warga Mesuji mengungkap tragedi pembantaian petani di daerah mereka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah perusahaan perkebunan. Di depan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta mereka mengatakan sebanyak 30 warga dibantai yang dipicu sengketa lahan di Mesuji, Lampung.

Sengketa lahan di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. *Pertama*, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moromoro, Pelita Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani.

Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektare di Kawasan Register 45. *Kedua*, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat.

Para pelapor yang mengadu ke DPR Rabu lalu (14/12) itu adalah warga yang mendiami Kawasan Register 45 di Alpa 8 atau yang mereka sebut Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mesuji Timur. Mereka merupakan korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak 1996. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu berakhir pada 2024.

Sebelumnya lahan seluas 43.900 hektare Kawasan Register 45 itu dikelola oleh PT Inhutani V hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva anak usaha Sungai Budi Group dan berganti menjadi nama PT Silva Inhutani. Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT Silva.

Pada 1997 sejumlah warga mulai mendiami kawasan yang ditanam sengon dan tanaman industri lain peninggalan PT Inhutani V. Mereka menebangi tanaman yang ada di kawasan itu hingga gundul. “Jumlahnya masih sedikit. Sebagian mereka membuka

usaha tambal ban di tepi Jalan Lintas Timur Sumatera,” karta Sumarno, salah seorang warga Moro-moro.

Perambah marak berdatangan setelah tahun 1999. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Lampung Timur, Tulangbawang, Metro bahkan dari Jawa Barat, Bali, dan Makassar. “Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama mereka. Awalnya hanya mendirikan gubung sebagai tempat melepas lelah se usai menanam singkong,” kata Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung.

Saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan jumlah warga yang datang semakin panjang. “Pemerintah kerap negosiasi seumur singkong. Warga selalu berjanji akan pergi setelah singkong dipanen. Alasan itu selalu dipakai seperti pada penggusuran terakhir di Pelita Jaya,” katanya.

Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra.

Rata-rata warga di desa Moro-Moro menanam singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektare lahan.

Bahkan, tersebut ada yang menguasai lahan hingga seratus hektare. Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Gelombang selanjutnya pada tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya.

Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordiniasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 juta hingga Rp 15 juta. “Semua tergantung pada luas dan lokasi. Kami harus membayar kepada pengurus,” kata Rahmad, yang sudah keluar dari kawasan itu dan memilih tinggal di Bandar Lampung.

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada bulan September 2010.

Tim beranggotakan ribuan orang itulah yang mengusir permukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Sempat ada perlawanan, tapi tidak ada korban jiwa. “Penertiban yang digelar 6 November 2010 yang menyebabkan satu orang warga tewas dan satu lainnya terluka,” kata Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Jodie Rooseto.

Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pascaperistiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan.

Tim itu kembali menggusur warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur, 21 Pebruari 2011. Warga melawan dengan memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera. Belasan orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu.

Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga panen singkong usai. Hingga akhirnya, pada Rabu 14 Desember 2011, warga Pelita Jaya mengadukan ke DPR RI soal adanya pembantaian. “Kami tegaskan tidak ada pembantaian. Faktanya hanya ada satu korban tewas dan satu terluka,” kata salah seorang pejabat PT Silva Inhutani.

Dia mengaku heran dengan tudingan warga yang menyatakan perusahaan telah melanggar HAM. Dia justru menuding para perambah itu yang telah merampas dan menebangi pohon yang mereka tanam. “Kami memiliki HPH TI secara sah dan sesuai dengan prosedur. Mari selesaikan secara hukum jangan asal tuduh,” katanya.

Sementara konflik lain terjadi di Areal Perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Perusahaan itu terlibat sengketa dengan penduduk asli di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang telah digarap turun-temurun. “Kami sudah berjuang meminta lahan itu dikembalikan sejak tujuh belas tahun lalu,” kata Rano Karno, Kagungan Dalam, Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang menjadi korban tembak aparat pada peristiwa itu.

Puncaknya pada 10 Nopember 2011. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka. “Polisi menembaki kami dengan membabi buta,” katanya.

Saat ini Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengadvokasi para korban sengketa lahan di desa Nipah Kuning, Kagungan Dalam, dan Tanjung Raya. LBH menuding tragedi berdarah itu karena polisi lebih berpihak pada perusahaan. “Ada upaya pembantaian. Warga dihujani tembakan dari berbagai arah. Tidak ditemukan perlawanan warga,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Indra Firsada.

Polda Lampung sendiri telah menahan Ajun Komisaris Wetman Hutagaol dan Aiptu Dian Permana karena dianggap lalai dan menyebabkan warga tewas dan terluka. Keduanya juga

dihukum dengan ditunda kenaikan pangkatnya secara berkala. “Hukuman itu terlalu ringan. Mestinya mereka diseret ke pengadilan,” ujar Indra.

## **H. Konflik Tulangbawang.**

Peristiwa kekerasan antara warga dengan pihak perusahaan di Mesuji, baik yang berada di Lampung maupun di Sumatera Selatan, bukanlah hal baru. Seperti antara warga Desa Sungai Sodong dengan PT SWA dan warga warga Kampung Sri Tanjung, Mesuji, dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI), yang berdampak pengurasakan bangunan hingga memakan korban sebenarnya bukan hal baru.

Di daerah yang dulunya termasuk wilayah Kerajaan Tulangbawang, sebuah kerajaan tua sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri ini sering kali terjadi bentrokan antara massa dengan sebuah perusahaan. Pada 13 dan 15 Desember 1998, ribuan petambak di PT Wachyuni Mandira (WM) melakukan perlawanan dengan pihak perusahaan. Kekerasan terjadi terhadap petambak yang diduga dilakukan aparat keamanan dan karyawan. Sementara para petambak merusak aset milik perusahaan Sjamsul Nursalim, sang koruptor yang hingga kini belum tertangkap.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia (HRW).



Saat itu Sidney Jones, ketika masih bekerja di HRW, melakukan investigasi ke lokasi konflik, termasuk dilakukan aktifis Munir yang juga turut memperjuangkan persoalan tersebut. Namun, akhirnya perjuangan petambak yang menuntut kejelasan kepemilikan tambak sebagai plasma tetap kandas, justru puluhan petambak yang dituduh sebagai provokator disidangkan dan dipenjara. Pada saat yang sama, bentrokan juga terjadi di perusahaan PT Dipasena, juga perusahaan penambakan udang milik Sjamsul Nursalim yang menguasai Bumi Dipasena seluas 16.200 hektare.

Berbeda dengan PT WM yang kini cenderung tenang. Konflik di lokasi petambakan udang di Bumi Dipasena terus berlanjut, meskipun yang mengelola petambakan berpindah tangan ke perusahaan PT AWS (Aruna Wijaya Sakti). Selama hampir setahun ini warga memblokir semua jalan menuju lokasi di Bumi Dipasena, yang merupakan petambakan udang terbesar di Asia Tenggara, sehingga sebanyak 7.700 petambak tidak dapat berbudi daya udang.

Tetapi, di tengah kecemasan orang akan konflik di Bumi Dipasena, justru muncul konflik antara warga Kampung Sri Tanjung, Mesuji, dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) yang menewaskan satu orang warga dan beberapa orang terluka akibat peluru dari aparat keamanan. Konflik ini bersama

konflik berdarah di Sungai Sodong, Mesuji, Sumatera Selatan, tengah diinvestigasi oleh pemerintah, terkait dengan dugaan pelanggaran HAM.

Meskipun belum menjurus ke konflik berdarah, pemerintah jangan melupakan konflik antara warga dengan PT AWS, yang sebetulnya memiliki potensi ledakan lebih besar. Sebab berdasarkan informasi yang didapat, para petambak tradisional kecewa dengan PT AWS yang tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat, hasil kesepakatan warga dengan PT AWS, yang dimediasi beberapa pihak, termasuk Komnas HAM.

Dari beberapa data di atas, para pengusaha, pemerintah, dan aparat keamanan, tampaknya harus memiliki strategi baru dalam mengembangkan usahanya di kawasan Mesuji dan Tulangbawang, sehingga di masa mendatang, konflik dapat dihentikan. Mungkin langkah yang harus diambil, seperti diungkapkan JJ Polong, seorang aktifis dari Serikat Petani Indonesia (SPI), tanah warga yang diambil harus dikembalikan, dan hentikan semua langkah yang mengusir tanah warga, khususnya tanah ulayat.

Menurut sumber Lampung Post, 14-03-2013, Konflik antara petambak plasma PT Centralpertiwi Bahari (CPB) yang tergabung dalam Forsil (Forum Silaturahmi) dan petambak Plasma Peduli Kemitraan (P2K) menyebabkan tiga orang tewas dan 28 luka-luka.

Tiga korban tersebut ditemukan tenggelam di kanal kemarin. Mereka terjun ke kanal untuk menyelamatkan diri saat terjadi bentrokan, Selasa (12-3) lalu. Sekitar pukul 09.30, kemarin, mayat Suwandi (40), karyawan cold storage, ditemukan di kanal. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 14.00, mayat Edi Ardiyansah (25), karyawan cold room, warga Reksobinangun, Rumbia, juga ditemukan tenggelam di kanal. Satu setengah jam kemudian, pukul 15.30, kembali ditemukan mayat di kanal atas nama Sumanto (36), petambak plasma di jalur 22 Kampung Adiwarna.

Corporate Communication Manager CP Prima George H. Basoeki didampingi Head of CPB Operation Arman Zakaria mengatakan tiga korban tewas dan 28 luka-luka itu semuanya dari pihak P2K dan karyawan CPB. "Kami turut berbelasungkawa," ujar George Basuki saat memberikan penjelasan di Bandar Lampung, Rabu (13-3).

Menurut George, situasi di PT CPB juga masih mencekam. Ratusan warga yang umumnya istri dan anak-anak petambak P2K mengungsi keluar lokasi karena ketakutan. Sementara itu, Satgas

Forsil Edi mengatakan pihak Forsil juga ada yang terluka, tetapi ia belum bisa menyebutkan siapa nama-nama korban. "Saya kurang tahu persis, sebelumnya mereka dirawat di Puskesmas Sungaiburung," kata Edi.

Rapat Pemkab Tulangbawang kemarin menggelar rapat di ruang rapat utama Bupati untuk membahas kasus yang terjadi di PT CPB. Hadir dalam rapat tersebut, dari kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat. Pemkab juga mengundang PT CPB, P2K, dan Forsil. Namun, Forsil tak menghadiri undangan tersebut.

Rapat yang dipimpin Bupati Hanan A. Rozak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo itu bertujuan menentukan langkah jangka pendek untuk mencegah bentrok susulan. "Saya minta aparat penegak hukum tegas, ungkap kebenaran tangkap pelaku penyebab kerusuhan. Sebab ini tindakan biadab sekali, saya sangat kecewa," kata Hanan. Usai rapat, Bupati yang didampingi Wakil Bupati dan Camat Denteteladas Ketut Romeo mengaku turut berbelasungkawa atas musibah yang menelan korban jiwa tersebut. Pemkab juga memberi uang duka kepada keluarga korban masing-masing Rp5 juta.

Heri Wardoyo menambahkan kasus itu harus menjadi pelajaran berharga. "Ini adalah masalah serius, saya berharap kedua belah pihak dapat menjaga agar tidak kembali terjadi bentrok," kata Heri. Kapolres Tulangbawang AKBP Shobarmen, saat ditemui usai

rapat, menyatakan pihaknya telah menerjunkan 150 personel, sementara Dandim 0426/Tulangbawang juga telah mengerahkan 80 anggotanya.

## **I. Konflik Lampung Utara**

Berdasarkan laporan utama Lampost, Rabu, 1 Juni 2011, Tiga nyawa melayang sia-sia dalam bentrok antardesa di Lampung Utara. Satu korban lagi mengalami luka berat. Bentrok antara warga Desa Negeri Ujungkarang dan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Muarasungkai, Lampura, itu terjadi pada Senin (30-5) malam. Tiga korban tewas, Anggun (26) dan Rodiwijaya (20), keduanya warga Negeri Ujungkarang, dan Saiful Anwar (26), warga Negara Tulangbawang, Bungamayang, Lampura. Sedangkan Suranto (18), warga Desa Karangsakti, Muarasungkai, Lampura, mengalami luka berat.

Bentrok bermula saat Anggun dan Rodiwijaya ditangkap warga Sumberagung karena diduga mencuri getah karet milik Sahroni (55), warga Sumberagung. Keduanya tewas setelah dihajar dan dibakar warga. "Sepeda motor milik kedua korban juga dibakar," kata Kapolres Lampura AKBP Frans Sentoe, Selasa (31-5).

Mengetahui Anggun dan Rodiwijaya tewas, warga Negeri Ujungkarang segera berkumpul dan menyerang warga Sumberagung yang masih desa tetangganya itu. Saat itulah, massa

diduga menghabisi nyawa Saiful Anwar yang sedang berada di rumah Sahroni. Massa juga melukai Suranto.

Saiful Anwar tewas dengan luka bacok di perut kiri, bahu kanan, dan paha kanan. Sedangkan Suranto tiga luka bacok di punggung dan kepala. Warga Negeri Ujungkarang merusak dan membakar rumah serta menjarah kendaraan milik warga Sumberagung. Tiga rumah dibakar, delapan dirusak, dan lima motor yang dijarah. "Termasuk rumah kepala desa, Subroto, juga ikut dibakar," ujar Kapolres.

Saat ini Polres mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. "Kami masih menyelidiki kasus ini," katanya. Pemantauan di lokasi hingga pukul 16.00 kemarin, suasana dua desa yang bertetangga itu masih mencekam. Aparat Brimob Polda Lampung dan Polres Lampura berjaga-jaga. Tak satu pun warga Sumberagung berada di rumahnya. Sedangkan di Negeri Ujungkarang, sejumlah warga masih berjaga-jaga sambil membawa senjata tajam.

Kapolda Lampung Brigjen Sulistyo Ishak langsung meninjau lokasi bentrok. Ia berdialog dengan warga dua desa itu. Secara terpisah, Wakil Bupati Lampura Rohimat Aslan berjanji berkoordinasi lintas sektoral untuk mencari solusi atas konflik tersebut. "Saya sangat menyesalkan kejadian ini," ujarnya.

## **J. Konflik Lampung Tengah**

Konflik komunal di Lampung Tengah pernah terjadi pada Kamis, 8 November 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, antara warga Kampung Buyut Gunung Sugih yang menyerang Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri. Warga Buyut datang dengan dua truk dan bersenjata tajam langsung menyerang kampung Kesumadadi.

Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini, namun kerugian materi tidak terhindarkan: enam rumah rusak berat akibat dibakar massa, dan sekitar 31 rumah lainnya rusak ringan dilempar benda keras. Saat itu juga 300 an warga Kesumadadi diungsikan di Pondok Pesantren Darul Mustakim yang berada di sekitar Desa Kesumadadi.

Aksi brutal warga ini dipicu kasus pencurian sapi pada 18 Oktober 2012. Kala itu, 3 ekor sapi milik warga Kampung Kesumadadi hilang, dan ketika pencurinya ditangkap, langsung dihakimi massa dan dibakar hingga tewas. Belakangan diketahui seorang yang diduga pencuri itu adalah warga Kampung Buyut bernama Khairil Anwar.

Mengetahui seorang warganya tewas mengenaskan, warga Kampung Buyut memobilisasi untuk menyerang Kampung Kesumadadi pada 8 November 2012 dengan menggunakan sepeda motor dan truk. Aparat kepolisian dengan kekuatan ratusan orang

telah berusaha menahan massa agar tidak masuk ke Kampung Kesumadadi, namun upaya ini gagal.

Setelah berhasil masuk kampung, massa langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran. Aparat mencoba memundurkan massa yang beringas ke perbatasan kampung, dan pada sekitar jam 19.00 WIB massa berhasil dibubarkan oleh petugas dari Brimob Polda Lampung.

Tidak lama kemudian, pejabat dari Polda Lampung dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Lampung Tengah langsung memantau lokasi kejadian. Pengamanan di lokasi diperkuat untuk mengantisipasi aksi balasan. Sebanyak 5 kompi dari Brimob, 1 kompi gabungan Sabhara Polda Lampung, 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK), 1 pleton Satpol PP diterjunkan.

Setelah melalui perundingan dan musyawarah antara dua kampung yang berseteru dengan dimediasi pihak keamanan dan pemerintah Kabupaten, maka perdamaian pun dilangsungkan. Ribuan Warga Desa Kusumadadi dan Desa Buyut Udik, Kabupaten Lampung Tengah, bersumpah selalu bersaudara dan mengakhiri permusuhan. Dua desa yang sempat berkonflik ini pun menyampaikan ikrar saudara dan perdamaian di Balai Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah, (22/11/2012).

Warga dari dua desa datang berbondong-bondong dengan menggunakan bus untuk menghadiri ikrar damai dan persaudaraan



yang disaksikan Bupati Lampung Tengah A. Pairin, Wakil Bupati Mustafa, perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan TNI 043 Garuda Hitam.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lampung Genta mengatakan ikrar perdamaian dan persaudaraan yang dibacakan oleh perwakilan tokoh dari dua desa tersebut. Ada tiga poin perdamaian; bersumpah dan mengakui bahwa bahwa seluruh warga dari dua desa adalah saudara dan akan hidup berdampingan secara damai, saling tolong menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan hingga akhir zaman.

”Warga juga saling berjanji untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara persaudaraan dan hubungan baik, dan tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak persaudaraan,” kata Genta kepada detikcom, Kamis (2/11/2012).

Usai pembacaan ikrar ribuan warga saling bersalama bersama para pejabat pemerintahan. Para tokoh dan warga yang hadir diminta untuk meneruskan ikrar perdamaian kepada warga lainnya agar tersosialisasi dengan baik.

Genta mengatakan Bupati Lampung Tengah berharap agar perdamaian akan terus terjadi pasca ikrar persaudaraan yang terjadi di dua desa tersebut. Jika sudah bersaudara maka perselisihan bisa diselesaikan dengan damai tanpa perlu ada kekerasan.

Akan tetapi, beberapa waktu kemudian, di tempat yang berbeda, terjadi lagi tawuran antarakampung di Lampung Tengah. Ini berawal dari kecelakaan lalu lintas, warga dua kampung di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, terlibat tawuran. Tiga orang dibacok dan satu orang tertembak. Berdasarkan informasi dari Polda Lampung, bentrokan terjadi pada Selasa, 15 Oktober 2013 i sekitar pukul 11.00 WIB.

Awalnya, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kampung Sukajawa, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah, antara pejalan kaki bernama Jumiyati, warga Kampung Sukajawa, dan seorang pengendara motor bernama Rico Ferdi Fernando, warga Kampung Gunungsugih Baru.

“Saat korban hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ditabrak oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria tanpa nomor polisi. Korban terjatuh dan mengalami luka,” kata Kabag Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih, Selasa (15/10/2013).

Setelah itu, tambah Sulistyaningsih, pihak keluarga dan kerabat pelaku mendatangi lokasi kecelakaan. “Pelaku kecelakaan sebelumnya telah menghubungi keluarganya karena ditahan oleh keluarga korban,” tuturnya.

Keluarga pelaku kemudian mendatangi keluarga korban dengan maksud hendak menjemput Rido dan membawa sepeda motornya, namun keluarga korban bersikeras tetap menahan Rico. Keluarga pelaku pun kembali ke Kampung Sukajawa dengan membawa massa. Terjadi bentrokan, perusakan, dan pembakaran.

Akibat tawuran antarkampung tersebut, empat warga Kampung Sukajawa mengalami luka serius. Mereka diketahui bernama Suhendi yang mengalami luka tembak di kaki sebelah kanan; Asmuni dan Mustafa, menderita luka bacok di tangan kanan; dan Sidik, menderita luka bacok di dada kanan. Belum jelas dari mana asal tembakan tersebut.

### **K. Konflik Lampung Selatan**

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 09.30 WIB di desa Sidorejo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi bentrokan antara warga suku Lampung dan warga suku Bali.

Kronologis kejadian : Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan Lintas Way Arong Desa Sidorejo (Patok) Lampung Selatan antara sepeda ontel yang dikendarai oleh suku Bali di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai An. Nurdiana Dewi, 17 tahun, (warga Desa Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan berboncengan dengan

Eni, 16 Th, (warga desa Negri Pandan Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan).

Dalam peristiwa tersebut warga suku Bali memberikan pertolongan terhadap Nurdiana Dewi dan Eni, namun warga suku Lampung lainnya memprovokasi bahwa warga suku Bali telah memegang dada Nurdiana Dewi dan Eni sehingga pada pukul 22.00 WIB warga suku Lampung berkumpul sebanyak + 500 orang di pasar Patok melakukan penyerangan ke pemukiman warga suku Bali di desa Bali Nuraga Kec. Way Panji. Akibat penyerangan tersebut 1 (satu) kios obat-obatan pertanian dan kelontongan terbakar milik Sdr Made Sunarya, 40 tahun, Swasta.

Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 01.00 WIB, masa dari warga suku Lampung berjumlah + 200 orang melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah milik Sdr Wayan Diase. Pada pukul 09.30 WIB terjadi bentrok masa suku Lampung dan masa suku Bali di Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Akibat kejadian tersebut 3 (tiga) orang meninggal dunia masing-masing bernama: Yahya Bin Abdul Lalung, 40 tahun, Tani, (warga Lampung) dengan luka robek pada bagian kepala terkena senjata tajam, Marhadan Bin Syamsi Nur, 30 tahun, Tani, (warga Lampung) dengan luka sobek pada leher dan paha kiri kanan dan Alwi Bin Solihin, 35 tahun, Tani, (warga Lampung), sedangkan 5

(lima) orang warga yang mengalami luka-luka terkena senjata tajam dan senapan angin masing-masing : An. Ramli Bin Yahya, 51 tahun, Tani, (warga Lampung) luka bacok pada punggung, tusuk perut bagian bawah pusar, Syamsudin, 22 tahun, Tani, (warga Lampung) Luka Tembak Senapan Angin pada bagian Kaki. Ipul, 33 tahun, Swasta, (warga Lampung) Luka Tembak Senapan Angin pada bagian paha sebelah kanan dan Mukmin Sidik, 25 tahun, Swasta, (warga Lampung) luka Tembak Senapan Angin di bagian betis sebelah kiri.

Konflik antar suku dilampung memang bukan merupakan sebuah hal baru, konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah berawal dari masalah sepele. Bahkan di tempat yang sama dengan saat ini terjadi perang suku saat ini yaitu di Sidorejo kecamatan Sidomulyo juga pernah terjadi pada bulan januari 2012 kemarin, pemicunya adalah perebutan lahan parkir. Berikut ini beberapa perang antar suku yang pernah terjadi di Lampung :

- Pembakaran pasa Probolinggo Lampung Timur oleh suku bali.
- 29 Desember 2010 : Perang suku Jawa / Bali vs Lampung berawal dari
  - pencurian ayam.
- September 2011 : Jawa vs Lampung

- Januari 2012 : Sidomulyo Lampung Selatan Bali vs Lampung
- Oktober 2012 : Sidomulyo Lampung Selatan.

Konflik diatas adalah beberapa konflik yang terhitung besar, selain konflik besar yang pernah terjadi diatas di lampung juga sering terjadi konflik – konflik kecil antar suku namun biasanya hal tersebut masih bisa diredam sehingga tidak membesar.

Dalam rangka upaya meredakan konflik komunal antara etnis Lampung dan Bali di atas, diselenggarakan pertemuan para tokoh adat Lampung dan Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan maklumat yang ditandatangani Raja Bali, I Gusti Ngurah Arya dan Ketua Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsya serta beberapa tokoh Bali dan Lampung. Maklumat tersebut berisi:

1. Bersepakat bahwa terkait aksi massa dan tragedi Lampung Selatan, bukan merupakan konflik SARA, namun disebabkan oleh adanya kepentingan sekelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan warga Bali dan warga Lampung.
2. Mengecam terjadinya kerusuhan yang melibatkan warga Bali dan warga Lampung hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, penjarahan, serta pembakaran harta benda dari masyarakat yang tidak berdosa.

3. Bersepakat dalam beberapa hal untuk menyelesaikan konflik tragedi Balinuraga yakni: menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses penyelesaian kasus dan sebagai solusi bermartabat; bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petugas keamanan untuk dapat mengedepankan semangat netralitas dan ketidakberpihakan dalam mengawal tuntasnya hingga pemulihan kondisi warga yang menjadi korban; memberi dorongan dan dukungan atas upaya Komnas HAM dan lembaga hukum dan masyarakat baik dalam skala lokal, nasional, dan internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian abadi; mendorong dan memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian abadi dengan melibatkan unsur-unsur adat sebagai panglima dari kebudayaan Indonesia termasuk warga adat di dalamnya; mewaspadaikan adanya kasus-kasus lanjutan yang saling terkait dengan sejumlah kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
4. Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik dengan alasan apapun.
5. Mengimbau masyarakat adat Lampung – Bali untuk mengedepankan prinsip kebersamaan, kesatuan dan persatuan.

## **L. Analisis Konflik Di Lampung**

Mengapa konflik bisa meletus di Lampung yang dikenal oleh banyak orang sebagai “pelangi khatulistiwa”? Apakah karena beragamnya etnis yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis di wilayah tersebut? Mengapa tak lama berselang dari konflik komunal tersebut, muncul lagi tawuran antarwarga yang lagi-lagi membawa isu etnis ke permukaan? Apa benar perbedaan etnis menjadi satu-satunya alasan di balik terlukanya kehidupan keberagaman di Lampung ?.

Banyak pertanyaan, sekaligus kekhawatiran, yang muncul ketika kita dihadapkan pada situasi konflik komunal yang semakin marak di bumi pertiwi akhir-akhir ini. Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. penulis akan sedikit mencoba mengurai benang kusut yang terdapat dalam peristiwa konflik balinuraga di Lampung Selatan dengan memakai pendekatan analisis konflik.

Prof. Mochtar Mas'oed  
(<http://setyowatidwi.wordpress.com/2012/11/30>) menyatakan bahwa sebenarnya bentrok antar warga di Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012 adalah bagian tak terpisahkan dari konflik yang terjadi sebelumnya yang kembali terulang. Konflik tersebut



sesungguhnya memiliki akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga tambak udang, sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali.

Di sinilah pentingnya kita melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses state building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi. Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif sebagai “putra daerah”.

Samsu Rizal Panggabean (*Ibid.*) menilai terulangnya konflik Lampung menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat keamanan untuk mencegah terjadinya konflik. Terlebih, telah diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena

intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas. Yang terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan. Yang ada adalah mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang berulang seperti di Lampung Tengah, Selatan, dan Utara, pencegahan harus menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung ini menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak bagus dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan baru-baru ini melibatkan dua kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai “suku asli” ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai peristiwa tersebut.

Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Yang pertama adalah pemerintah daerah setempat. Dalam beberapa kasus yang mencuat, kebijakan bupati dan gubernur yang agak sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Sangat disayangkan, dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi mediator. Yang kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan, dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya rekonsiliasi.

Selain itu, faktor-faktor di balik muncul dan berkembangnya konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau root causes yang seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan. Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok

tetapi juga disuburkan oleh tersisihnya etnis Dayak dari penguasaan politik-ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung juga dapat diteropong dengan kerangka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut.

Kelompok masyarakat etnis Bali di Lampung Selatan sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi, sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung “hanya” menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan. Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama menjadi individualistik, bergesernya tradisi generasi lama yang berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris

sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi.

Selain itu, pergolakan sosial di Lampung awalnya lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka jatuh. Mengapa persoalan sepele bisa meletup menjadi masalah besar yang meresahkan seluruh kawasan?

Menurut Syafarudin dari Universitas Lampung (harian Lampung Post pada tanggal 29 oktober 2012), konflik yang pernah ada selama ini tidak pernah ditangani secara tuntas, implementasinya rendah dan tidak maksimalnya peran pranata yang ada, khususnya pemerintah lokal yang seharusnya dekat dengan masyarakat dan mengayomi. Pemerintah lokal harus menjadi fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat sehingga ketika ada letupan sekecil apapun, dapat menjadi tokoh yang didengar dan mau mendengarkan serta disegani.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik yang penuh dengan kekerasan di Lampung Selatan adalah sebuah rangkaian dari kekerasan struktural berupa kesenjangan ekonomi, dimana pada satu sisi ada kelompok yang diuntungkan oleh struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang ada dan di sisi lain ada kelompok yang tersisihkan, serta kekerasan kultural berupa perbedaan etnis yang “melegitimasi” bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tanpa upaya memutus mata rantai segitiga kekerasan ini, konflik-konflik akan terus bermunculan, sewaktu-waktu tanpa pernah dapat diduga.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab timbulnya konflik sosial di Lampung dapat dipetakan menjadi tiga: *pertama*, faktor perebutan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana yang terjadi di Mesuji. *Kedua*, faktor penguasaan sumber ekonomi sebagaimana konflik yang terjadi di Dipasena Tulangbawang. *Ketiga*, faktor sosial sebagaimana terjadi di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
2. Kantong-kantong wilayah yang paling sering terjadi konflik adalah Kabupaten Mesuji, Bumi Dipasena Tulangbawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Proses penyelesaian konflik biasanya dalam bentuk mediasi yang difasilitasi pihak ketiga baik dari kalangan aparat keamanan, tokoh-tokoh adat/agama, maupun pemerintah daerah.

#### **B. Rekomendasi**

1. Bahwa berlalutnya resolusi konflik di Lampung adalah sikap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang

masih memercayakan kemampuan masyarakat dan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan persoalan konflik secara mandiri. Dalam hal ini resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai. Untuk itu, diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif.

2. Solusi jangka pendek adalah segera menyelesaikan persoalan itu secara tepat, dengan sesedikit mungkin menimbulkan resistensi dari kalangan yang terlibat. Di sini diperlukan kerja sama banyak pihak. Tidak saja dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh, ataupun ormas, tetapi juga aparat dan pemerintah, termasuk pengadilan. Dalam perspektif manajemen resolusi konflik pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan atau institusi yang dipercaya dapat memainkan peran itu, memainkan peran yang amat krusial. Kegagalan pada level ini kerap akan cenderung memberikan preseden negatif dan memperburuk situasi.



3. Dalam konteks jangka menengah, solusi yang mungkin adalah memperbaiki kinerja dan profesionalisme aparat keamanan agar dapat lebih sensitif dan efektif mencegah serta menyelesaikan rangkaian konflik sejak dini. Dibutuhkan pula sebuah desain besar dan pelebagaan pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat di dalamnya.
4. Dalam konteks jangka panjang, jelaslah bahwa persoalan segregasi primordial dan disparitas ekonomi yang selalu jadi biang keladi kemunculan konflik harus dapat direduksi semaksimal mungkin.

### **C. Kata Penutup.**

Penelitian ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan masih merupakan penelitian awal, karena itu perlu ada penelitian lanjutan. Sebab, memahami persoalan resolusi konflik harus dilihat secara komprehensif, apalagi yang hingga sekarang belum ada penyelesaian konkret adalah kasus Mesuji dan Dipasena. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ketersediaan anggaran, maka dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian survey, hasil ini masih jauh dari sempurna. Maka, segala kritik dan saran sangatlah diharapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Addison, Michael. 2002. *Violent Politics; Strategies of Internal Conflict*. Palgrave. London
- Adler, P. S. 2000. *Natural Resources Conflict Resolution: Water, Science, and The Search for Common Ground*. 1st Australian Natural Resources Law and Policy Conference. Canberra.
- Anonymous. 1996. *Managing Conflict in the Post-Cold War World: The Role of Intervention*. The Aspen Institute. Washington, D.C.
- Anwar, D. F. *et al.* 2005. *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Bebbington, A. 1997. "Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes". *Geographic Journal*, Vol. 163/2,
- Braakman L, Edwards K. 2002. *The Art of Building Facilitation Capacities. A Training Manual*. Bangkok: RECOFTC
- Castro, A. P and Nielsen, E. 2003. *Natural Resource Conflict Management Case Studies: An Analysis of Power, Participation and Protected Areas*. FAO. Rome.
- Davidson, James S., David Henley dan Sandra Moniaga. 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Penerbit KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Engel A, Korf B. 2005. *Teknik-Teknik Perundingan dan Mediasi untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Roma: FAO.

[FAO] Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2002. *Community based [PNPM Mandiri] Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. 2012. Manajemen Konflik. Modul Khusus Fasilitator.

\_\_\_\_\_. 2006. *Conflict Management over Natural Resources Capacity Building Program under the Community-Based Rural Development Program Project*. FAO. Rome

Fisher S et. al. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra. Terjemahan dari: Working with Conflict: Skills and Strategies for Action . UK: Zed Books Ltd.

Guillot, Claude. (1990). *The Sultanate of Banten*. Gramedia Book Publishing Division. hlm. 19.

Hardjana AM. 1994. *Konflik di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Kanisius.

Klinken, Garry. V. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Kriesberg, L. 1998. *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. Boulder Rowman and Littlefield Publisher. Inc. New York

Luckham, R. 1998. *Democratic Institutions and Politics in Context of Inequality, Poverty, and Conflict*. IDS Working Paper No. 104.

- Malik, I. et. al. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*. Yayasan Kemala. Jakarta.
- McAdam, D., Tarrow, S. dan Tilly, C. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press. New York.
- Mitchell et al. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yoyakarta: Gajah Mada University Press. Terjemahan dari: Resource and Environment management.
- Moeliono I dkk. 2003. *Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan, buku acuan metodologi pengelolaan sengketa sumberdaya alam*. Bandung: Studio Driyamedia.
- Moore CW. 1996. *The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict* (2nd edition). Jossey-Bass Publisher.
- Oberschall, A. 1978. Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology Vol. 4*.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2001. *Teori-Teori Sosiologi Modern*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Suporahardjo (Editor). 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin.
- Suporahardjo (Editor). 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Plurasisme Membangun Konsensus*. Bogor: Pustaka Latin.
- Tadjoeddin, M. Z. 2006. *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy*. UNDP. Jakarta.

Varshney, A. *et al.* 2006. *Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)*. American Political Science Association. Philadelphia.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Wulan YC dkk. 2004. *Warta Kebijakan: Konflik kehutanan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi*. Bogor: CIFOR.

Zartman, I. W. 2000. *Mediation in Ethnic Conflicts*. Center for Development Research. Bonn

*Surat Kabar:*

Kompas/3/November/2012. *Konflik Lampung: Perdamaian Antarwarga terus Diupayakan*.

Kompas/2/November/2012. *Kasus Lampung: Harus bangkit bangun Potensi*.

<http://lampung.bps.go.id/index.php/statistik-berdasarkan-subjek/penduduk/tabel/76-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-2010%7Ctitle=BPS>  
Lampung 2011

[http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul\\_pelatihan08/](http://www.p2kp.org/pustaka/files/modul_pelatihan08/) [22 Juli 2012.

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW***  
**KARYA ILMIAH : BUKU/PENELITIAN**

Judul Buku : *Pemetaan Resolusi Konflik Di Lampung*

Penulis Buku : **Dr. H. M. Afif Anshori, M. Ag.**

Identitas Buku : a. ISBN :  
b. Edisi :  
c. Tahun terbit : 2013  
d. Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
e. Jumlah halaman : 130 halaman

Kategori Publikasi Karya : ☐ Buku Refrensi

Buku kategori yang tepat : ☒ Buku Penelitian

Hasil Penilai Peer Review :

Komponen Yang Dinilai %	Nilai Maksimal Buku 2		Nilai Akhir yang Diperoleh 1,58
	Refrensi <input type="checkbox"/>	Penelitian <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)		15	0,3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		24	0,48
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		25	0,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		15	0,3
<b>Totl = (100%)</b>			

Bandar Lampung, Februari 2016  
Reviewer 2

**Prof. Dr. H. Nasor, M. Si.**

Jabatan : Guru Besar/Fak. Dakwah dan Ilmu Komuni-  
kasi IAIN Raden Intan Lampung

Bidang Ilmu : *Ilmu Komunikasi*

Asal Instansi : IAIN Raden Intan Lampung

**LEMBAR**  
**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW***  
**KARYA ILMIAH : BUKU/PENELITIAN**

Judul Buku : *Pemetaan Resolusi Konflik Di Lampung*

Penulis Buku : **Dr. H. M. Afif Anshori, M. Ag.**

Identitas Buku : a. ISBN :  
b. Edisi : 1.  
c. Tahun terbit : 2013  
d. Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
e. Jumlah : 130 halaman

Kategori Publikasi Karya : ☐ Buku Refrensi

Buku kategori yang tepat : ☒ Buku Penelitian

Hasil Penilai Peer Review :

Komponen Yang Dinilai 75 %	Nilai Maksimal Buku 2		Nilai Akhir yang Diperoleh 1,5
	Refrensi <input type="checkbox"/>	Penelitian <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)		15	0,3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		22	0,44
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		23	0,46
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		15	0,3
<b>Tot: = (100%)</b>			

Bandar Lampung, Pebruari 2016

Riviewer 1



**Prof. Dr. H. M. A. Achlami, HS, M.A**

Jabatan : Guru Besar/Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
IAIN Raden Intan Lampung

Bidang Ilmu : Tasawuf

Asal Instansi : IAIN Raden Intan Lampung